

## ANALISIS VARIANS DAN PERTUMBUHAN BELANJA DAERAH PADA PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA UTARA

oleh:  
**Andy M. K. Kasi**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi  
Universitas Sam Ratulangi Manado  
email: [claus\\_moran@yahoo.com](mailto:claus_moran@yahoo.com)

### ABSTRAK

Anggaran Belanja Daerah harus memiliki sistem pengendalian agar dapat dilaksanakan secara efektif. Pemerintah Daerah dalam mengalokasikan Anggaran Belanja daerah harus memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran daerah. Pengalokasian Anggaran Belanja Daerah dimaksud untuk menyeimbangkan antara pengeluaran kas daerah dengan penerimaan kas daerah. Belanja daerah adalah kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya nilai varians dan pertumbuhan belanja daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis deskriptif. Data yang digunakan berupa data primer yang didapat dari Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara. Penelitian pada Dinas Penerimaan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara dapat disimpulkan bahwa penyusunan anggaran baik, tapi penggunaan anggaran masih kurang efektif, dilihat dari Realisasi Belanja lebih kecil dari Anggaran Belanja, dan Pertumbuhan Belanja dari Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara dari tahun ketahun mengalami kenaikan, alasan kenaikan belanja daerah biasanya dikaitkan dengan perubahan kurs Rupiah.

**Kata kunci:** *anggaran belanja, analisis varians, pertumbuhan belanja*

### ABSTRACT

*Budget region must have control system so as to be implemented effectively. Local governments to allocate regional spending must consider factors affecting the regional budgets. The budget local expenditure referred to to match cash outlays areas with acceptance local treasury. Regional spending is compulsory regional recognized as a deduction value net assets in the period related budget year. Local expenditure included all expenditure of account of the public treasury areas that reduces equity smoothly, that is incumbent upon area in one year who will not obtained its payment back by the region. Research aims to know the magnitude of variance and growth regional spending. Method research used is a method of analysis descriptive. Data used in form of data primary obtained from regency minahasa Utara. On revenue from the research agency financial management and local asset minahasa utara governments can be concluded that budgeting good. but still less effective, of the budget viewed from the smaller than spending budget, and growth of spending governments minahasa utara ketahun increased, from year cause increase spending usually attributed to change the Rupiah.*

**Keywords:** *budget, analysis variance, the growth of spending*

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Kemajuan suatu bangsa sangat dipengaruhi oleh peran dan kinerja sektor publik, bahkan bisa dikatakan tidak mungkin ada negara tanpa kehadiran sektor publik. Negara kapitalis menganut pasar bebas sempurna sekalipun masih membutuhkan peran sektor publik, apalagi negara sosialis yang menjadikan sektor publik sebagai sektor terpenting dalam sistem ekonomi, sosial dan politiknya. Negara Republik Indonesia yang bukan merupakan negara kapitalis maupun sosialis tapi negara Pancasila juga menjadikan sektor publik sebagai sektor penting negara. Sektor publik memiliki peran yang tidak kecil dalam suatu negara yang dapat berdampak pada sektor lain yaitu sektor swasta maupun sosial (Mahmudi, 2011:59)

Salah satu usaha pemerintah dalam mewujudkan perkembangan dibidang pemerintahan, pembangunan dan perekonomian adalah dengan diadakannya otonomi daerah. Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan pelaksanaan tugas dalam bidang pemerintahan, pembangunan, dan perekonomian serta pelayanan kepada masyarakat. Otonomi yang diberikan kepada daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas dan penuh dengan rasa tanggung jawab. Oleh karena itu instansi pemerintah dituntut mempunyai pimpinan yang dapat bekerja dengan efektif dan efisien, agar mampu mengelola dengan baik instansinya tersebut. Otonomi daerah menuntut setiap pemerintah daerah agar lebih mandiri dalam membiayai anggaran pembangunan pada setiap daerah/wilayah. Manfaat dari otonomi daerah adalah agar dapat mendorong kreativitas masyarakat dalam pembangunan serta mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan diseluruh Indonesia (Adisasmita, 2011:27).

Pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan secara professional, terbuka dan bertanggung jawab sesuai dengan pokok yang telah ditetapkan dalam undang-undang No.17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan juga untuk mendukung terwujudnya *good govermance*. Penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah didanai atas beban anggaran pendapatan dan belanja. Oleh karena itu yang pertama harus diperhatikan adalah seberapa besar total pendapatan yang diterima daerah selama satu tahun anggaran. Dengan diketahuinya total pendapatan yang diperkirakan diterima selama satu tahun anggaran, maka setelah dibandingkan dengan kebutuhan pembiayaan dalam tahun yang bersangkutan dapat terlihat apakah anggaran yang tersedia dapat menutupi kebutuhan pembiayaan (belanja) atau tidak. Apabila ternyata rencana kebutuhan belanja lebih besar dari rencana pendapatan daerah, maka daerah harus berupaya menutupi kekurangan (*deficit*) tersebut.

Anggaran Belanja Daerah harus memiliki sistem pengendalian agar dapat dilaksanakan secara efektif. Pemerintah Daerah dalam mengalokasikan Anggaran Belanja daerah harus memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran daerah. Pengalokasian Anggaran Belanja Daerah dimaksud untuk menyeimbangkan antara pengeluaran kas daerah dengan penerimaan kas daerah. Anggaran belanja yang diterima oleh setiap instansi pemerintah daerah tentunya dapat menunjang pertumbuhan belanja daerah guna dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari setiap Kota/Kabupaten yang ada di Indonesia. Kabupaten Minahasa Utara merupakan salah satu daerah yang ada di Indonesia yang mendapatkan predikat Laporan Keuangan "Wajar Dengan Pengecualian" pada tahun 2006 sampai tahun 2012. Selain hal tersebut Kabupaten Minahasa Utara dalam beberapa tahun terakhir juga mengalami perkembangan misalnya dalam bidang sosial dan sarana prasarana umum yang ada. Melihat hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang nilai rata-rata pertumbuhan anggaran belanja daerah yang terjadi pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara dari Tahun 2009-2012.

### Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui besarnya varians dan pertumbuhan belanja daerah pada Dinas Penerimaan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa Utara.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Analisis Anggaran

Anggaran adalah perencanaan keuangan untuk masa depan yang pada umumnya mencakup jangka waktu satu tahun dan dinyatakan dalam satuan moneter. Anggaran ini merupakan perencanaan jangka pendek organisasaasi yang menerjemahkan berbagai program kedalam rencana keuangan tahunan yang lebih kongkret.

Usulan anggaran pada umumnya telah terlebih dahulu diusulkan oleh pejabat yang lebih tinggi untuk bisa dijadikan anggaran formal. Penyusunan anggaran pada organisasi sektor publik dapat membantu mewujudkan akuntabilitas. Berdasarkan anggaran yang telah ditetapkan, masyarakat secara tidak langsung dapat melakukan pengawasan atau pengendalian (Mahsun, 2012:74).

### **Akuntansi Sektor Publik**

Sektor publik dapat dipahami sebagai satu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik dilihat dari sudut pandang ilmu ekonomi. Organisasi sektor publik merupakan organisasi yang bergerak dibidang pelayanan publik dan penyelenggaraan negara dalam rangka melaksanakan konstitusi negara. Organisasi sektor publik pada umumnya berupa lembaga-lembaga negara atau pemerintahan atau organisasi yang memiliki keterkaitan dengan keuangan negara (Mahmudi, 2011: 166).

Akuntansi sektor publik berperan penting dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Laporan keuangan yang berkualitas memiliki karakteristik dapat dipahami, relevan, dapat diandalkan, dan dapat dibandingkan. Selain itu, kualitas laporan keuangan juga dapat dilihat dari hasil opini auditor. Jika Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) auditor independen memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), maka hal itu menandakan laporan keuangan disajikan sangat baik. Jika auditor memberikan opini wajar Dengan Pengecualian (WDP), maka mengindikasikan laporan keuangan disajikan cukup baik. Jika auditor memberi opini Tidak Wajar (TW), maka hal itu menunjukkan laporan keuangan buruk. Dan jika auditor tidak memberi pendapat (*disclaimer opinion*), maka hal itu menunjukkan laporan keuangan sangat buruk (Mahmudi, 2011:166).

### **Analisis Belanja Daerah**

Belanja daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih (ekuitas dana) dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Dalam Peraturan Pemerintah Dalam Negeri No. 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2011, belanja daerah disusun berdasarkan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata, agar relatif dapat dinikmati oleh masyarakat, khususnya dalam pemberian pelayanan umum. Oleh karena itu dalam penyusunan APBD Tahun anggaran 2011, Pemerintah Daerah menetapkan target capaian baik dalam konteks daerah, satuan kerja, dan kegiatan sejalan dengan urusan yang menjadi kewenangannya. Akuntansi belanja disusun selain untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan, juga dapat dikembangkan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen dengan cara yang memungkinkan pengukuran belanja tersebut. Dalam laporan realisasi anggaran, klasifikasi yang digunakan adalah klasifikasi ekonomi. Untuk kelompok belanja, yaitu belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan transfer (Mursyidi, 2009:292).

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Pemerintah daerah harus mengalokasikan belanja daerah secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum. Oleh karena itu, untuk dapat mengendalikan tingkat efisiensi dan efektivitas anggaran, maka dalam perencanaan anggaran belanja perlu diperhatikan penetapan secara jelas tujuan dan sasaran, hasil dan manfaat, serta indikator kinerja yang ingin dicapai, penetapan prioritas kegiatan dan penghitungan beban kerja, serta penetapan harga satuan yang rasional. Urusan wajib adalah urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar kepada masyarakat yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas social dan fasilitas umum yang layak serta mngembangkan sistem sosial yang diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standart minimal (Darise, 2008:46).

Peningkatan kualitas hidup diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal berdasarkan urusan wajib pemerintahan daerah sesuai dengan aturan perundang-undangan. Yang dimaksud dengan urusan pilihan meliputi urusan pemerintah yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, potensi keunggulan daerah yang

bersangkutan antara lain pertambangan, perikanan, pertanian, perdagangan, perkebunan, kehutanan dan pariwisata. Analisis belanja daerah sangat penting dilakukan untuk mengevaluasi apakah pemerintah daerah telah menggunakan APBD secara ekonomis, efisien dan efektif.

Mahmudi (2010:156) menyatakan analisis belanja daerah digunakan untuk melihat sejauh mana pemerintah daerah telah melakukan efisiensi anggaran, menghindari pengeluaran yang tidak perlu dan pengeluaran yang tidak tepat sasaran. Berdasarkan informasi pada Laporan Realisasi Anggaran kita dapat membuat analisis anggaran khususnya analisis belanja, antara lain varians belanja, analisis pertumbuhan belanja, analisis keserasian belanja, rasio efisiensi belanja dan rasio belanja terhadap PDRB. Belanja yang dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran pemerintah merupakan pengeluaran kas yang sudah terjadi selama tahun berjalan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah, belanja daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja daerah diklasifikasikan menurut fungsi, organisasi, program, kegiatan, kelompok belanja, dan jenis belanja (ekonomi).

Darise (2009:40) mengungkapkan yang dimaksud klasifikasi belanja menurut organisasi pemerintahan daerah seperti Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Badan, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan. Sedangkan klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan organisasi pemerintahan. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja, sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program.

Belanja daerah mula-mula di bagi ke dalam dua bagian, yaitu : bagian belanja aparatur daerah dan bagian belanja pelayanan publik. Masing-masing bagian belanja tersebut dirinci menurut kelompok belanja yang meliputi belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan serta belanja modal. Setiap kelompok belanja dirinci menurut jenis belanja. Jenis belanja dirinci menurut objek belanja. Selanjutnya setiap objek belanja dirinci menurut rincian objek belanja. Sedangkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintah, tidak mengenal adanya pembagian kedalam bagian belanja aparatur daerah dan bagian belanja pelayanan publik. Disamping itu, tidak ada pengelompokan kedalam belanja administrasi umum maupun belanja operasi dan pemeliharaan. Pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi ini meliputi belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan transfer. Klasifikasi kedua adalah menurut organisasi, yaitu klasifikasi berdasarkan unit organisasi pengguna anggaran. Sementara itu, klasifikasi menurut fungsi adalah klasifikasi yang didasarkan pada fungsi-fungsi utama pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan jaminan sosial dengan mempertimbangkan analisis standar belanja, standar harga, tolok ukur kinerja dan standar pelayanan minimal yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Belanja pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diklasifikasikan berdasarkan kelompok belanja yaitu belanja langsung dan belanja tidak langsung. Darise (2009:42) menjelaskan belanja tidak langsung adalah belanja yang penganggarnya tidak dipengaruhi secara langsung oleh adanya usulan program atau kegiatan. Kelompok belanja tidak langsung dibagi menurut jenis belanja yaitu belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja keuangan dan belanja tidak terduga.

### **Analisis Varians dan Pertumbuhan Belanja**

Dalam hal belanja daerah terdapat ketentuan bahwa anggaran belanja merupakan batas maksimum pengeluaran yang boleh dilakukan pemerintah daerah. Dalam hal ini pemerintah daerah akan dinilai baik kinerja belanjanya apabila realisasi belanja tidak melebihi yang dianggarkan. Analisis varians merupakan analisis terhadap perbedaan atau selisih antara realisasi belanja dengan anggaran.

Analisis varians cukup sederhana namun dapat memberikan informasi yang sangat berarti. Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran yang disajikan, pembaca dapat mengetahui secara langsung besarnya varians anggaran belanja dengan realisasinya yang bisa dinyatakan dalam bentuk nilai nominalnya atau persentasenya. Selisih anggaran belanja dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu ; selisih disukai (*favourable variance*), selisih

tidak disukai (*unfavourable variance*). Dalam hal ini realisasi belanja lebih kecil dari anggarannya maka disebut *favourable variance*, sedangkan jika realisasi belanja lebih besar dari anggarannya maka dikategorikan *unfavourable variance*.

Selisih realisasi belanja dengan yang dianggarkan yang cukup signifikan bisa memberikan dua kemungkinan. Pertama hal itu menunjukkan adanya efisiensi anggaran, kedua justru sebaliknya. Jika terjadi selisih kurang maka sangat memungkinkan telah terjadi kelemahan dalam perencanaan anggaran sehingga estimasi belanjanya kurang tepat, atau tidak terserapnya anggaran tersebut bisa jadi disebabkan karena ada program dan kegiatan yang tidak dilaksanakan eksekutif padahal sudah diamanatkan dalam anggaran. Oleh karena itu, untuk mengetahui penyebab varians tersebut DPRD perlu melakukan penelusuran dan konfirmasi langsung dengan pihak eksekutif sehingga bisa menilai apakah selisih tersebut menunjukkan kinerja anggaran yang baik atau hanya karena anggaran yang ditetapkan kurang efisien.

Belanja daerah terdapat ketentuan bahwa anggaran belanja merupakan batas maksimum pengeluaran yang boleh dilakukan pemerintah daerah. Dalam hal ini pemerintah daerah akan dinilai baik kinerja belanjanya apabila realisasi belanja tidak melebihi dari yang dianggarkan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan Analisis Varians Belanja dan Analisis Pertumbuhan belanja. Analisis Varians merupakan perbedaan atau selisih antara realisasi belanja dan anggaran. Berdasarkan laporan realisasi anggaran dan belanja ditinjau dari Analisis Varians bisa ditanyakan dalam bentuk nominalnya atau persentasenya.

Varians belanja daerah dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{Varians} = \text{Realisasi Belanja} - \text{Anggaran Belanja}$$

(Sumber: Mardiasmo, 2009:70)

Analisis pertumbuhan belanja bermanfaat untuk mengetahui perkembangan belanja dari tahun ke tahun. Pada umumnya belanja memiliki kecenderungan untuk selalu naik. Alasan kenaikan belanja biasanya dikaitkan dengan penyesuaian terhadap inflasi, perubahan kurs rupiah, perubahan jumlah cakupan layanan, dan penyesuaian faktor makro ekonomi. Namun demikian dengan paradigma baru otonomi daerah, pemerintah daerah harus dapat mengendalikan belanja daerah, melakukan efisiensi belanja dan penghematan anggaran. Analisis pertumbuhan belanja dilakukan untuk mengetahui berapa besar pertumbuhan masing-masing belanja, apakah pertumbuhan tersebut rasional dan dapat dipertanggungjawabkan. Pertumbuhan belanja harus diikuti dengan pertumbuhan pendapatan yang seimbang, sebab jika tidak maka dalam jangka mencegah dapat mengganggu kesinambungan dan kesehatan fiskal daerah.

Pertumbuhan belanja daerah dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Pertumbuhan Belanja Thn } t = \frac{\text{Realisasi Belanja Thn } t - \text{Realisasi Belanja Thn } t-1}{\text{Realisasi Belanja Thn } t-1}$$

Sumber: Mahmudi (2011:162)

**Penelitian Terdahulu****Tabel 1 Penelitian Terdahulu**

<b>Nama / Tahun</b>	<b>Judul</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Analisis</b>	<b>Perbedaan</b>	<b>Persamaan</b>
Arina / 2012	Analisis Pendapatan Dan Belanja Pada Pemerintah Kabupaten Kutai Timur	Untuk menganalisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah secara ekonomis, efisien dan efektif ( <i>value of money</i> )	Deskriptif	Penelitian Arina hanya menggunakan data sekunder yakni data yang telah diolah. Sedangkan penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder	Kedua penelitian ini sama-sama menggunakan anggaran sebagai subjek penelitian serta menggunakan metode yang sama yakni metode deskriptif
Kainde / 2012	Analisis Varians Dan Pertumbuhan Belanja Daerah Pada Pemerintah Kota Bitung	mengetahui nilai varians dan pertumbuhan belanja antara tahun 2009-2012	Deskriptif	christian mengambil Kota Bitung sebagai objek sedangkan penelitian ini mengambil Kabupaten Minahasa Utara sebagai objek	Menggunakan analisis penelitian yang sama

**METODE PENELITIAN****Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penyusunan skripsi Analisis Varians Dan Pertumbuhan Belanja Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara adalah jenis penelitian deskriptif, yaitu suatu penelitian dengan mengumpulkan data-data yang menggambarkan seluruh kegiatan berdasarkan fakta yang ada lalu mengolah dan menganalisa data kemudian menarik kesimpulan serta menginter-pretasikannya.

**Tempat dan Waktu Penelitian**

Tempat penelitian dilakukan di Kantor Bupati Kabupaten Minahasa Utara khususnya pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mulai dari bulan Mei sampai bulan Juni 2013.

**Prosedur Penelitian**

Adapun prosedur yang dilakukan dalam penelitian ini adalah :

- Mengambil data-data keuangan berupa data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara.
- Mengevaluasi anggaran belanja pemerintah dengan realisasinya melalui analisis varians belanja.
- Membandingkan dengan landasan-landasan teori yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
- Mengevaluasi anggaran belanja pemerintah dengan realisasinya melalui analisis varians pertumbuhan belanja.
- Dari hasil penelitian kemudian ditarik kesimpulan dan diberikan saran-saran.

**Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam usaha memperoleh data dan informasi yang berkenaan dengan penelitian ini, untuk dijadikan sebagai bahan atau materi pembahasan maka pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian lapangan, yaitu penelitian yang dilaksanakan di dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa Utara secara langsung untuk memperoleh data sehubungan dengan masalah yang dibahas. Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data objek penelitian dengan cara sebagai berikut :

1. Observasi, yaitu dengan mengumpulkan data keuangan yang didapat dari tempat penelitian untuk digunakan sebagai sumber penyusunan skripsi ini.
2. Dokumenter, yaitu pengumpulan data dengan menggunakan arsip atau dokumen-dokumen yang bersifat tulisan dari perusahaan.

### Metode Analisis

Metode analisis dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari dinas pendapatan dan belanja daerah akan dianalisa berdasarkan analisis komparatif atau perbandingan antara dua atau lebih suatu variabel tertentu. Adapun prosedur analisa yang dilakukan dalam penelitian ini adalah :

- a. Mengambil data-data keuangan berupa data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dari Dinas pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara.
- b. Mengevaluasi anggaran belanja pemerintah dengan realisasinya melalui analisis varians belanja.
- c. Mengambil landasan-landasan teori yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bagian ini akan dibahas mengenai Anggaran Belanja pemerintah yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Minahasa Utara. Belanja dapat dipahami sebagai kewajiban pemerintah daerah yang mengurangi kekayaan bersih yang terjadi akibat masa lalu. Namun dalam hal ini perlu dipahami bahwa belanja daerah berbeda dengan pengeluaran daerah. Tidak semua pengeluaran yang dilakukan pemerintah daerah menyebabkan berkurangnya kas rekening.

Belanja daerah terdapat ketentuan bahwa anggaran belanja merupakan batas maksimum pengeluaran yang boleh dilakukan pemerintah daerah. Dalam hal ini pemerintah daerah akan dinilai baik kinerja belanjanya apabila realisasi belanja tidak melebihi dari yang dianggarkan. Penelitian ini penulis menggunakan Analisis Varians Belanja dan Analisis Pertumbuhan belanja. Analisis Varians merupakan perbedaan atau selisih antara realisasi belanja dan anggaran. Berdasarkan laporan realisasi anggaran dan belanja ditinjau dari Analisis Varians bisa ditanyakan dalam bentuk nominalnya atau persentasenya. Selisih anggaran belanja dapat ditinjau dari dua jenis yaitu selisih disukai (*favorable varians*) dan selisih tidak disukai (*unfavorable varians*). Analisis varians cukup sederhana namun dapat memberikan informasi yang sangat berarti. Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran yang disajikan, pembaca dapat mengetahui secara langsung besarnya varians anggaran belanja dengan realisasinya yang bisa dinyatakan dalam bentuk nilai nominalnya atau persentasenya. Sedangkan analisis pertumbuhan belanja daerah adalah untuk mengetahui berapa besar pertumbuhan masing-masing belanja, apakah pertumbuhan tersebut rasional dan dapat dipertanggungjawabkan. Pertumbuhan belanja harus diikuti dengan pertumbuhan pendapatan yang seimbang, sebab jika tidak maka dapat mengganggu kesinambungan dan kesehatan fiskal daerah.

Realisasi belanja lebih kecil dari anggarannya disebut *Favorable Varians* , sedangkan realisasi belanja lebih besar dari anggarannya dikategorikan *Unfavorable Varians*. Selisih realisasi belanja dengan yang dianggarkan yang cukup signifikan bisa memberikan dua kemungkinan. Pertama hal itu menunjukkan adanya efisiensi anggaran, kedua justru sebaliknya. Jika terjadi selisih kurang maka sangat mungkin telah terjadi kelemahan dalam perencanaan anggaran sehingga estimasi belanjanya kurang tepat, atau tidak terserapnya anggaran tersebut bisa jadi disebabkan karena ada program dan kegiatan yang tidak dilaksanakan padahal sudah dicatat dalam anggaran.

**Tabel 2 Analisis Varians pada Laporan Realisasi Anggaran**

No	Uraian	Anggaran Tahun 2012	Realisasi Tahun 2012	Varians	
				Rp	%
<b>Belanja</b>					
<b>BELANJA OPERASI</b>					
	Belanja pegawai	319,030,859,674	290,381,668,606	(28,649,191,068)	(8.98)
	Belanja barang	94,028,358,475	83,454,815,644	(10,573,542,831)	(11.25)
1	Bunga	-	-		
	Subsidi	-	-		
	Hibah	8,175,779,500	7,429,180,500	(746,599,000)	(9.13)
	Bantuan Sosial	2,201,720,500	1,866,000,000	(335,720,500)	(15.25)
	Bantuan Keuangan	-	-		
	<b>Jumlah belanja operasi</b>	<b>423,436,718,149</b>	<b>383,131,664,750</b>	<b>(40,305,053,399)</b>	<b>(9.52)</b>
<b>BELANJA MODAL</b>					
	Belanja tanah	15,500,033,000	7,172,128,490	(8,327,904,510)	(53.73)
	Belanja peralatan dan mesin	26,860,108,406	25,296,528,033	(1,563,580,373)	(5.82)
2	Belanja gedung dan bangunan	33,118,285,730	31,586,782,323	(1,531,503,407)	(4.62)
	Belanja jalan, irigasi, dan jaringan	47,405,145,412	45,022,287,853	(2,382,857,559)	(5.03)
	Belanja aset tetap lainnya	1,468,657,435	1,423,168,735	(45,488,700)	(3.10)
	Belanja aset lainnya	-	-		
	<b>Jumlah Belanja Modal</b>	<b>124,352,229,983</b>	<b>110,500,895,434</b>	<b>(13,851,334,549)</b>	<b>(11.14)</b>
<b>BELANJA TAK TERDUGA</b>					
3	Belanja tak terduga	3,750,000,000	2,917,633,200	(832,366,800)	(22.20)
	<b>Jumlah belanja tak terduga</b>	<b>3,750,000,000</b>	<b>2,917,633,200</b>	<b>(832,366,800)</b>	<b>(22.20)</b>
	<b>TOTAL BELANJA</b>	<b>551,538,948,132</b>	<b>496,550,193,384</b>	<b>(54,988,754,748)</b>	<b>(9.97)</b>

Data empat tahun terakhir, pada tahun 2012 justru terjadi peningkatan selisih negative dari seluruh realisasi anggaran terhadap anggaran belanja yang mencapai Rp. 45.975.744.197 dimana hal ini berpengaruh positif maupun negative. Pengaruh positifnya adalah, adanya efisiensi atau penghematan anggaran, dan juga sisa anggaran ini dapat dijadikan sebagai modal rencana anggaran tahun depan. Sedangkan sisi negatifnya, terjadi kelemahan dalam perencanaan anggaran sehingga estimasi belanjanya kurang tepat. Berdasarkan tabel 2 tersebut dapat diketahui terdapat selisih negative antara Realisasi Belanja dengan Anggaran Belanja Daerah dimana Realisasi Belanja lebih kecil dari Anggaran Daerah yang telah ditetapkan tahun 2012. Dalam tabel 2 dijelaskan pula nilai variannya sebesar Rp. 54.988.754.748 atau 90.03 %. Lewat laporan Realisasi Anggaran diatas dapat diketahui selisih anggaran belanja dan realisasi belanja, dan hal ini juga mengindikasikan adanya efisiensi atau penghematan anggaran.

**Tabel 3 Analisis Varians pada Anggaran Belanja Daerah tahun 2009-2012**

Tahun	Anggaran	Realisasi	Varians	%
2009	447,568,410,619	401,592,666,422	45,975,744,197	10.27
2010	419,868,755,263	386,600,353,009	33,268,402,254	7.92
2011	497,637,587,291	445,249,831,284	52,387,756,007	10.53
2012	551,538,948,132	496,550,193,384	54,988,754,748	9.97

Kinerja pemerintah daerah dinilai baik apabila pemerintah daerah mampu melakukan efisiensi belanja. Jika dilihat dari selisih yang cukup signifikan antara tahun 2009-2012, sangatlah mungkin terjadi kelemahan dalam perencanaan anggaran sehingga perkiraan dalam belanjanya kurang tepat, atau tidak terserapnya anggaran tersebut bisa jadi disebabkan ada program dan kegiatan yang tidak dilaksanakan padahal sudah direncanakan dalam anggaran yang pada intinya sisa dari penghematan tersebut bisa disalurkan ke pos-pos belanja yang masih kurang.



**Tabel 4. Analisis Pertumbuhan Belanja**

No	Uraian	Realisasi Tahun 2011	Realisasi Tahun 2012	Pertumbuhan	
				Kenaikan / Penurunan	%
<b>BELANJA</b>					
<b>BELANJA OPERASI</b>					
	Belanja pegawai	258,844,259,526	290,381,668,606	31,537,409,080	12.18
	Belanja barang	64,305,391,785	83,454,815,644	19,149,423,859	29.78
1	Bunga	-	-		
	Subsidi	-	-		
	Hibah	7,891,036,250	7,429,180,500	-461,855,750	-5.85
	Bantuan Sosial	18,571,876,940	1,866,000,000	-16,705,876,940	-89.95
	Bantuan Keuangan	-	-		
	<b>Jumlah belanja operasi</b>	<b>349,612,564,501</b>	<b>383,131,664,750</b>	<b>33,519,100,249</b>	<b>9.59</b>
<b>BELANJA MODAL</b>					
	Belanja tanah	8,554,930,500	7,172,128,490	-1,382,802,010	-16.16
	Belanja peralatan dan mesin	13,152,565,148	25,296,528,033	12,143,962,885	92.33
2	Belanja gedung dan bangunan	18,332,745,782	31,586,782,323	13,254,036,541	72.30
	Belanja jalan, irigasi, dan	54,915,865,237	45,022,287,853	-9,893,577,384	-18.02
	Belanja aset tetap lainnya	578,910,116	1,423,168,735	844,258,619	145.84
	Belanja aset lainnya	-	-		
	<b>Jumlah Belanja Modal</b>	<b>95,535,016,783</b>	<b>110,500,895,434</b>	<b>14,965,878,651</b>	<b>15.67</b>
<b>BELANJA TAK TERDUGA</b>					
3	Belanja tak terduga	102,250,000	2,917,633,200	2,815,383,200	2753.43
	<b>Jumlah belanja tak terduga</b>	<b>102,250,000</b>	<b>2,917,633,200</b>	<b>2,815,383,200</b>	<b>2753.43</b>
	<b>Total belanja</b>	<b>445,249,831,284</b>	<b>496,550,193,384</b>	<b>51,300,362,100</b>	<b>11.52</b>

**Tabel 5 Pertumbuhan Belanja Daerah dari 2009-2012**

No	Uraian	2009-2010	2010-2011	2011-2012
1	Belanja Operasi	54,921,530,003	35,913,598,456	33,519,100,249
2	Belanja Modal	(69,653,843,416)	23,023,629,819	14,965,878,651
3	Belanja Tak terduga	(360,000,000)	(187,750,000)	2,815,383,200
	<b>Total Belanja</b>	<b>(15,092,313,413)</b>	<b>58,749,478,275</b>	<b>51,300,362,100</b>

Tabel 5 yang telah diolah diatas dapat dilihat pertumbuhan belanja daerah tahun 2009 – 2012 dari tahun ke tahun mengalami kenaikan serta penurunan pertumbuhan yang ditunjukkan berdasarkan nilai nominal dari total belanja yang diperoleh setiap tahunnya memiliki nilai positif dan negatif. Ini menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah dalam menyusun anggarannya mengalami pertumbuhan belanja hanya pada belanja operasi saja dan tidak pada belanja modal dan belanja tak terduga. Pertumbuhan anggaran belanja tertentu bisa saja negatif atau lebih kecil dari tahun sebelumnya jika memang belanja tersebut tidak prioritas untuk tahun sekarang. Anggaran tertentu yang tidak menambah nilai bisa dihilangkan dan dialihkan untuk belanja lain yang prioritasnya lebih penting. Prinsipnya pertumbuhan belanja daerah harus terencana dan terkendali dengan baik agar kesinambungan dan stabilitas fiskal daerah terjaga.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Hasil penelitian menggunakan analisis varians dan analisis pertumbuhan belanja dapat diketahui bahwa anggaran belanja pemerintah kabupaten Minahasa Utara dari tahun 2009 sampai tahun 2012 mengalami pertumbuhan. Setelah melakukan perhitungan dapat dilihat jumlah yang signifikan antara selisih dari anggaran belanja yang ditetapkan dan realisasinya. Dalam perhitungan yang menggunakan rumus analisis varians dan pertumbuhan belanja, angka yang diperoleh adalah negative. Namun dalam hal yang mencakup soal anggaran dan belanja daerah, angka negative ini dapat diartikan baik maupun buruk. Mengapa dikatakan baik karena

pemerintah dianggap melakukan efisiensi atau penghematan anggaran. Sedangkan mengapa dikatakan buruk karena pemerintah dianggap lalai dalam menetapkan anggaran sehingga tidak terserapnya anggaran yang telah ditetapkan.

### Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, maka dapat diberikan saran:

1. Perencanaan anggaran harus dilaksanakan dengan kebijakan antara anggaran dan realisasi.
2. Dalam penyusunan anggaran belanja, hendaknya memperhatikan situasi dan kondisi, agar anggaran yang sudah disusun dapat direalisasikan dengan baik.
3. Pemerintah harus memperhatikan setiap penyimpangan yang terjadi agar dalam penyusunan anggaran belanja yang akan datang dapat dilakukan dengan lebih baik.

### DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Graha Ilmu. Jakarta.
- Arina. 2012. Analisis Pendapatan Dan Belanja Pada Pemerintah Kabupaten Kutai Timur. *Jurnal*. Vol.1 No.1. Universitas Mulawarman. [http://journal.feunmul.in/ojs/index.php/publikasi\\_ilmiah](http://journal.feunmul.in/ojs/index.php/publikasi_ilmiah). Diakses 1 Desember 2013.
- Kainde, Christian. 2012. Analisis Varians Dan Pertumbuhan Belanja Pada Pemerintah Kota Bitung. *Skripsi*. Universitas Sam Ratulangi. Manado
- Darise, Nurlan. 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah*. PT. Indeks. Jakarta.
- Darise, Nurlan. 2009. *Pengelolaan Keuangan Pada Satuan kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan BLU*. Indeks. Jakarta.
- Mahmudi. 2010. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Edisi ke – 2. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2009. *Otonomi dan Manajemen keuangan daerah*. Andi. Yogyakarta.
- Mahmudi. 2011. *Akuntansi Sektor Publik*. UII Press. Yogyakarta.
- Mahsun, Mohamad. 2012. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. BPFE. Yogyakarta.
- Mursyidi. 2009. *Akuntansi Pemerintahan Di Indonesia*. PT. Refika Aditama. Jakarta.
- Republik Indonesia. PP No. 37 tahun 2010 Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Jakarta
- \_\_\_\_\_. PP No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Negara. Jakarta.